

Bab 4

VISI DAN MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Perencanaan pembangunan daerah secara global merupakan pondasi awal perencanaan setiap satuan perangkat kerja di lingkungan pemerintah daerah dalam menyusun tahapan demi tahapan kinerja pada struktur dan teknis bidang masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dalam hal ini, penyusunan rencana strategis SKPD dalam naungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 akan selalu berpedoman kepada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 agar terjadi keselarasan dalam pembangunan provinsi dan nasional. Oleh karena itu, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan salah satu satuan kerja di sektor pertanian Provinsi Kalimantan Timur merencanakan setiap tahapan pembangunan jangka menengah subsektor perkebunan dengan memperhatikan setiap rincian domain perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur pada periode yang bersangkutan.

Visi dan misi pembangunan sebagai corong terdepan target pembangunan di setiap sektor perencanaan merupakan rumusan utama dan tahapan terpenting dalam mewujudkan kerangka kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan dokumen renstra SKPD. Begitu pula Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, dalam rangka peningkatan setiap lini subsektor perkebunan perlu dirumuskan visi dan misi sebagai pondasi awal kelembagaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Visi kelembagaan akan menjelaskan arah tujuan adatu potret ideal Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebagai instansi/lembaga kredibel di masa mendatang sebagai dukungan sebuah sistem birokrasi maupun pelayanan publik terhadap setiap keberhasilan pembangunan daerah dan nasional. Sedangkan misi merupakan rumusan umum mengenai *trigger* hingga upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi kelembagaan secara efektif dan efisien. Misi yang diemban oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur merupakan dasar dari setiap sasaran pembangunan oleh pemerintah provinsi sekaligus mengawali penyusunan program/kegiatan perencanaan kinerja Dinas Perkebunan.

4.1. Visi dan Misi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018, bahwa Renstra SKPD merupakan bagian dari RPJMD yang tidak bisa dipisahkan, karena pada dasarnya RPJMD merupakan gradasi dari renstra SKPD. Sasaran RPJMD termasuk program prioritas akan dicapai melalui Renstra SKPD selama lima tahun. Implementasi dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dituangkan didalam Renstra masing-masing SKPD sesuai tugas dan fungsinya.

Sebagai instansi pemerintah yang visioner, Dinas Perkebunan harus memiliki pandangan jauh ke depan dengan segala perencanaan dan realisasi untuk selalu berkarya dalam pembangunan daerah sehingga di setiap periode pembangunan dapat eksis, antisipatif, inovatif, dan produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan dengan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan serta dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur seluruh komponen *stakeholder* pembangunan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 46 tahun 2008, maka Visi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang ingin diwujudkan melalui pembangunan subsektor perkebunan selama tahun 2013-2018 adalah:

***“Terwujudnya Perkebunan yang Tangguh untuk Mendukung
Agroindustri dan Ekonomi Hijau”***

Visi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memiliki kekuatan dalam memaknai kalimat di setiap rangkaian kata-katanya, bahwa Dinas Perkebunan sebagai instansi/lembaga naungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengemban tugas untuk mengawal Program Pembangunan yang menjadi Visi Gubernur Kalimantan Timur berdasarkan formulasi hasil analisis sektor perkebunan dalam kerangka pengembangan potensi daerah, identifikasi dan penyelesaian permasalahan pokok, serta antisipasi isu-isu strategis Provinsi Kalimantan Timur. Sesuai Visi Gubernur yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018 yaitu **"Mewujudkan Kaltim Sejahtera yang Merata dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan"**, maka Dinas Perkebunan mempunyai kewajiban untuk turut serta

mewujudkan Visi Gubernur dengan berbagai kebijakan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang dapat mendukung terwujudnya visi tersebut. Oleh karena itu, langkah pertama rencana strategis Dinas Perkebunan adalah menyepakati visi Dinas Perkebunan tahun 2013-2018 oleh seluruh staf Dinas Perkebunan maupun *stakeholders* yang mengacu pada visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018.

Visi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memiliki tujuan untuk memperkuat lini subsektor perkebunan sebagai salah satu penyangga struktur ekonomi sektor pertanian di Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu, penjabaran dari visi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dijelaskan sebagai berikut:

Terwujudnya perkebunan yang tangguh yaitu realisasi potret subsektor perkebunan yang secara dinamis dan optimal mampu memanfaatkan sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan teknologi pada lingkungan fisik dan sosial sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan peningkatan kesejahteraan petani perkebunan (pekebun). Karakteristik utama dalam pembentukan perkebunan yang tangguh adalah perencanaan setiap instansi yang terkait dengan subsektor perkebunan dalam menghasilkan produk berkualitas, beranekaragam, berdaya saing, serta secara kontinyu dan konsisten mampu menguasai dan memanfaatkan teknologi, sehingga sumber daya lahan yang digunakan dapat lestari dan pendapatan petani (khususnya perkebunan) dapat berkembang. Untuk mencapai hal tersebut, dukungan yang dibutuhkan tidak hanya berasal dari pemerintah selaku pengambil kebijakan, namun juga masyarakat sebagai subyek dari pelaksana pembangunan perkebunan dan swasta sebagai investor penunjang aktivitas perekonomian.

Indikasi pencapaian perkebunan yang tangguh dapat dilihat pada keberhasilan sistem di subsektor perkebunan yang ditopang oleh infrastruktur, kebijakan, komponen pendukung, dan efisiensi struktur mekanisme sehingga peningkatan hasil-hasil perkebunan dapat dinikmati oleh konsumen terutama masyarakat Provinsi Kalimantan Timur pada khususnya dan penduduk Indonesia atau mancanegara pada umumnya. Sedangkan kaitannya dengan produsen subsektor perkebunan, peningkatan kesejahteraan pekebun secara nyata dan berkelanjutan menjadi indikasi utama dari tangguhnya perkebunan dalam tataran pembangunan manusia Provinsi Kalimantan Timur.

Ketangguhan juga dikaitkan dengan kemampuan dalam pengelolaan perkebunan yang lebih antisipatif terhadap isu strategis dan dinamika lingkungan eksternal baik ditingkat nasional maupun internasional. Perubahan *mind-set* setiap pelaksana program/kegiatan subsektor perkebunan dari pengelolaan sistem perkebunan tradisional ke arah sistem modernisasi menjadi lompatan besar dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dan antisipasi isu-isu strategis yang berkembang.

Dukungan terhadap pengembangan agroindustri dan ekonomi hijau diwujudkan dalam bentuk ketersediaan berbagai komoditi unggulan subsektor perkebunan dalam menghasilkan produk-produk agroindustri dan sumbangan subsektor perkebunan sebagai sumber daya alam terbarukan sehingga berperan aktif dalam pembentukan ekonomi hijau. Oleh karena itu, visi Dinas Perkebunan sebagai penanggungjawab teknis subsektor perkebunan menjadi salah satu penentu utama pencapaian visi Provinsi Kalimantan Timur dimana pembangunan daerah harus terealisasi tanpa mengorbankan generasi mendatang (dalam koridor peningkatan kualitas lingkungan hidup).

Sebagaimana kita ketahui, **agroindustri** adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil produksi pertanian (dalam hal ini subsektor perkebunan) sebagai bahan baku kemudian merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk pengolahan lebih lanjut sehingga memiliki nilai tambah dan berdaya saing. Dukungan subsektor terhadap agroindustri diwujudkan dalam bentuk penyediaan produk unggulan perkebunan sebagai dasar olahan pada berbagai industri skala menengah ataupun besar. Pengembangan agroindustri perkebunan memiliki prospek yang cerah dan peluang keberhasilan tinggi untuk meningkatkan nilai tambah produk perkebunan dalam rangka peningkatan kualitas perekonomian sektor pertanian. Selain itu, agroindustri dapat menjadi lokomotif pertumbuhan perekonomian daerah karena industri pengolahan mampu mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif, yang akhirnya keunggulan tersebut akan memperkuat daya saing produk unggulan yang dikembangkan.

Ekonomi Hijau, menurut UNEP (*United Nation Environment Program* - Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa), memiliki pengertian bahwa ekonomi hijau merupakan perekonomian yang rendah karbon (tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan), hemat sumber daya alam, dan berkeadilan sosial. Ekonomi hijau adalah

ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial dengan prinsip dasar bahwa pertumbuhan ekonomi dilakukan bersama-sama melalui penurunan emisi sekaligus memperhatikan pembangunan yang berprinsip *Pro-Growth*, *Pro-Job*, dan *Pro-Environment*.

Pelaksanaan ekonomi hijau juga diwujudkan melalui pelaksanaan RAN-GRK, serta implementasi Stranas REDD+ dan SRAP REDD+ Kalimantan Timur. Dengan memperbaiki pengelolaan perkebunan menuju ekonomi hijau, hingga pengelolaannya lebih memperhatikan sosial dan lingkungan, diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perkebunan, serta memberikan manfaat ekonomi, yang juga menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Setelah perumusan visi pembangunan di subsektor perkebunan, tahapan selanjutnya adalah menjabarkan visi tersebut menjadi misi-misi yang akan diemban oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur selama masa periode perencanaan pembangunan daerah. Pernyataan perwujudan visi melalui misi-misi Dinas Perkebunan dimaksudkan agar setiap elemen kelembagaan Dinas Perkebunan maupun pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui, mengenal, dan berpartisipasi aktif dalam melaksanakan setiap detail misi yang telah disepakati. Oleh sebab itu, dalam setiap peranan Dinas Perkebunan dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Timur memiliki tujuan yang jelas terutama dalam merealisasikan misi-misi yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Produksi Perkebunan

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, kemudian mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan, serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Permasalahan utama dalam pembangunan perkebunan adalah masih rendahnya produksi dan produktivitas lahan, khususnya pada usaha perkebunan rakyat. Faktor yang menjadi penyebab rendahnya produktivitas antara lain disebabkan karena:

1. Penggunaan benih tanaman perkebunan yang tidak bermutu (*palsu/illegal*),
2. Kurangnya penyediaan pemanfaatan sarana produksi (pupuk, obat-obatan, dsb) serta input teknologi dalam pengelolaan perkebunan,

3. Terbatasnya infrastruktur pendukung baik untuk budidaya masa tanam, pengelolaan pasca panen, maupun pemasaran hasil, dan
4. Masih adanya gangguan eksternal usaha perkebunan yang berupa gangguan OPT (organisme pengganggu tanaman) maupun non OPT seperti terjadinya bencana alam atau konflik sosial antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan.

Dalam pencapaian realisasi misi Dinas Perkebunan, perlu adanya pengembangan agribisnis melalui program taktis di setiap lini pengembangan subsektor. Oleh sebab itu, dalam mengawal pengembangan agribisnis perkebunan perlu adanya:

1. Pengembangan sistem dan usaha agribisnis berbasis komoditi,
2. Dukungan dalam pengembangan pasar modal yang memungkinkan petani sebagai pemegang saham perusahaan,
3. Pengembangan inovasi teknologi dan kelembagaan,
4. Pengembangan keseimbangan perdagangan domestik dan internasional,
5. Pengembangan investasi kebun lengkap dengan pengolahannya, serta
6. Dorongan pada pengembangan industri hilir.

Dalam jangka menengah (kurun waktu 5 tahun ke depan), secara makro komoditi perkebunan Provinsi Kalimantan Timur seperti kelapa sawit, karet, kakao, lada, dan kelapa memiliki kesempatan dalam pengembangan produk yang tinggi sehingga diproyeksikan menjadi komoditi unggulan sehingga dapat berperan sebagai sumber devisa, penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan petani, serta berperan dalam upaya peningkatan pelestarian lingkungan hidup. Sedangkan pada tingkat mikro, beberapa komoditi perkebunan (kelapa sawit dan karet) telah menjadi sumber pendapatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi pelaku usahanya. Oleh sebab itu, untuk melaksanakan pengembangan komoditas unggulan perkebunan dalam jangka menengah tahun 2013-2018, ditempuh serangkaian program peningkatan produksi subsektor perkebunan melalui:

1. Peningkatan produktivitas lahan,
2. Penambahan luas areal, rehabilitasi, optimalisasi, dan diversifikasi lahan,
3. Penanganan gangguan usaha dan konflik sosial, serta
4. Pengembangan dan peningkatan sistem data base perkebunan.

Dengan peningkatan produksi dan kualitas komoditas perkebunan, diharapkan pendapatan petani perkebunan meningkat secara merata sehingga kesejahteraan petani secara keseluruhan dapat terwujud.

2. Meningkatkan Kualitas dan Nilai Tambah Produk

Produk utama perkebunan yang dihasilkan petani pekebun di Provinsi Kalimantan Timur sebagian besar dalam bentuk produk primer dan hanya sedikit yang diolah menjadi produk setengah jadi maupun produk jadi. Produk primer subsektor perkebunan selama ini lebih banyak untuk mengisi pasar-pasar ekspor dan sumber devisa untuk selanjutnya diolah oleh pihak luar. Petani perkebunan/pekebun masih sangat terpaku pada keluaran produk-produk perkebunan dalam bentuk komoditas primer seperti *crumb rubber*, CPO, lada putih/hitam, biji kakao (glondongan), dan lain-lain. Padahal di lain pihak perdagangan internasional bersikap sangat tidak adil terhadap produk-produk primer ini karena nilai jual produk primer yang rendah kemudian diolah menjadi produk setengah jadi atau produk jadi dengan harga jual yang jauh lebih tinggi.

Salah satu permasalahan dalam pemasaran produk primer perkebunan adalah fluktuasi harga yang tinggi pada produk primer perkebunan di luar batas keseimbangan penawaran dan permintaan. Hal tersebut dapat terjadi karena spekulasi pedagang besar komoditas di tingkat global. Sedangkan di pasar antar komoditas, struktur pasar komoditas primer masih cenderung searah sehingga akan merugikan petani sebagai pemangku kepentingan yang paling besar peranannya dalam memproduksi komoditas pertanian. Konsekuensi dari berbagai permasalahan tersebut adalah lambatnya kenaikan harga jual produk pertanian di tingkat global dan sebaliknya jika terjadi penurunan harga di tingkat global akan signifikan mempengaruhi harga jual pada level petani. Kondisi di atas menyebabkan nilai produk primer pertanian relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai produk olahan pertanian melalui agroindustri.

Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pada dasarnya adalah kegiatan agroindustri yang memiliki keterkaitan langsung antara proses hulu ke hilir, sehingga mampu menarik kemajuan sektor pendukung lainnya. Cara yang tepat dan cepat untuk meningkatkan nilai tambah produk adalah dengan cara pengembangan agroindustri di subsektor perkebunan baik dalam bentuk barang setengah jadi maupun barang jadi.

Dalam rangka peningkatan daya saing dan nilai tambah produk perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka menengah (tahun 2013-2018) maka ditempuh serangkaian program dan kegiatan peningkatan mutu hasil, peningkatan teknologi terapan, dan penganeekaragam produk olahan perkebunan. Program/kegiatan tersebut diimplementasikan melalui kegiatan penyediaan teknologi sarana dan prasarana pengolahan hasil, optimalisasi pemanfaatan alat dan mesin, serta peningkatan mutu produk olahan (pemberlakuan produk wajib sertifikat mutu). Dengan meningkatnya mutu dan penganeekaragaman produk olahan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk perkebunan di pasar regional maupun internasional.

3. Menguatkan Aspek Kelembagaan dan Pemasaran

Sumber daya manusia yang bergerak di subsektor perkebunan menjadi poin penting dalam perwujudan visi renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur baik pada periode saat ini maupun periode-periode yang akan datang. Namun hal tersebut menjadi permasalahan saat ini, karena petani perkebunan khususnya di Provinsi Kalimantan Timur kurang memiliki *skill* yang memadai dalam menjalankan perkebunan baik dari segi kemampuan teknis maupun kemampuan manajerialnya. Untuk itu perlu dilakukan kegiatan pemberdayaan petani sebagai upaya mendampingi, memotivasi, serta mendorong petani untuk mengorganisasikan diri dalam suatu wadah kelembagaan usaha untuk mensinergikan setiap potensi yang dimiliki. Dengan adanya optimalisasi kelembagaan tersebut, diharapkan kemampuan pekebun dalam segi teknis, manajemen, hingga pemasaran hasil perkebunan dapat meningkat sehingga terbentuk pekebun yang handal sekaligus organisasi perkebunan masyarakat yang kuat dan mandiri. Realisasi dari misi ini akan mendorong peningkatan posisi tawar pekebun dalam aspek usaha perorangan maupun dalam melakukan kerjasama dengan mitra usahanya.

Poin penting dalam penguatan aspek kelembagaan dan pemasaran adalah penyempurnaan koordinasi dan komunikasi baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota atau dari pemerintah daerah ke satuan kerja perangkat daerah terkait.

Penguatan aspek kelembagaan dan pemasaran merupakan pendukung dari misi pertama dan kedua yang mengimplementasikan peningkatan produksi perkebunan, peningkatan kualitas hasil produksi, dan peningkatan nilai tambah produk. Di Provinsi

Kalimantan Timur, salah satu model pemberdayaan petani dan kelembagaan yang telah dilaksanakan pada subsektor perkebunan dan menunjukkan hasil yang positif adalah model pemberdayaan petani dan kelembagaan melalui Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE) berdasarkan manajemen kemitraan.

4. Mengembangkan Perkebunan yang Berkelanjutan

Salah satu isu strategis yang menjadi acuan perencanaan setiap pembangunan di seluruh belahan dunia adalah terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan tanpa mempengaruhi pembangunan wilayah. Namun di sisi lain, sejarah membuktikan bahwasanya pembangunan ekonomi dalam kerangka pembangunan nasional selalu bertolak belakang dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup karena seiring dengan berkembangnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat maka konsumsi energi, sumber daya alam, hingga kebutuhan lahan akan terus meningkat. Oleh karena itu, perlu adanya titik temu dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dimana pembangunan daerah akan menstimulasi peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sebaliknya.

Dalam kaitannya dengan subsektor perkebunan sebagai ranah kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, peningkatan kualitas subsektor perkebunan secara garis besar akan beriringan jalan dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup karena setiap komoditas tanaman perkebunan merupakan sumber daya alam terbarukan. Meskipun begitu, perlu adanya perlakuan khusus pada pola penanaman beberapa komoditas tertentu agar tidak merusak unsur hara tanah.

Meskipun begitu, peningkatan subsektor perkebunan bukan tanpa masalah penurunan kualitas lingkungan. Contoh riil permasalahan komoditas perkebunan seperti tingginya penggunaan pupuk kimia dan pestisida terutama pada komoditas tertentu sebagai upaya peningkatan kualitas maupun kuantitas produksi, namun disisi lain penggunaan pupuk dan pestisida secara *massive* akan menghabiskan bahan baku pupuk maupun pestisida yang sebagian merupakan sumber daya tidak terbarukan.

Masalah lain yang muncul sebagai akibat revolusi hijau adalah dengan ditinggalnya praktek penggunaan bahan organik oleh petani dan diganti dengan pengangkutan biomassa secara besar-besaran sehingga sebagian besar lahan pertanian hanya mempunyai kandungan bahan organik kurang dari satu persen. Rendahnya kandungan bahan organik tanah akan menyebabkan tanah rentan terhadap degradasi

kesuburan sehingga ketergantungan petani pada ketersediaan pupuk kimia semakin meningkat.

Perkebunan yang berkelanjutan adalah aktivitas budidaya komoditas perkebunan yang secara terpadu memperhatikan peningkatan kualitas lingkungan hidup sebagai perhatian terhadap keberlangsungan masa depan dunia. Berkenaan dengan hal tersebut, perkebunan berkelanjutan akan:

1. Dapat memenuhi kebutuhan pangan dan energi,
2. Meningkatkan kualitas lingkungan dan sumberdaya alam,
3. Mengefisiensikan pemanfaatan sumber daya tidak terbarukan dengan pemanfaatan sumberdaya hayati,
4. Menguntungkan secara ekonomis, dan
5. Meningkatkan kualitas kesejahteraan petani dan masyarakat.

Dengan demikian maka pengertian perkebunan berkelanjutan menekankan pada:

- a. Keberlanjutan produktivitas,
- b. Kualitas lingkungan,
- c. Efisiensi pemanfaatan sumber daya tidak terbarukan,
- d. Kelayakan ekonomis, dan
- e. Kualitas kehidupan.

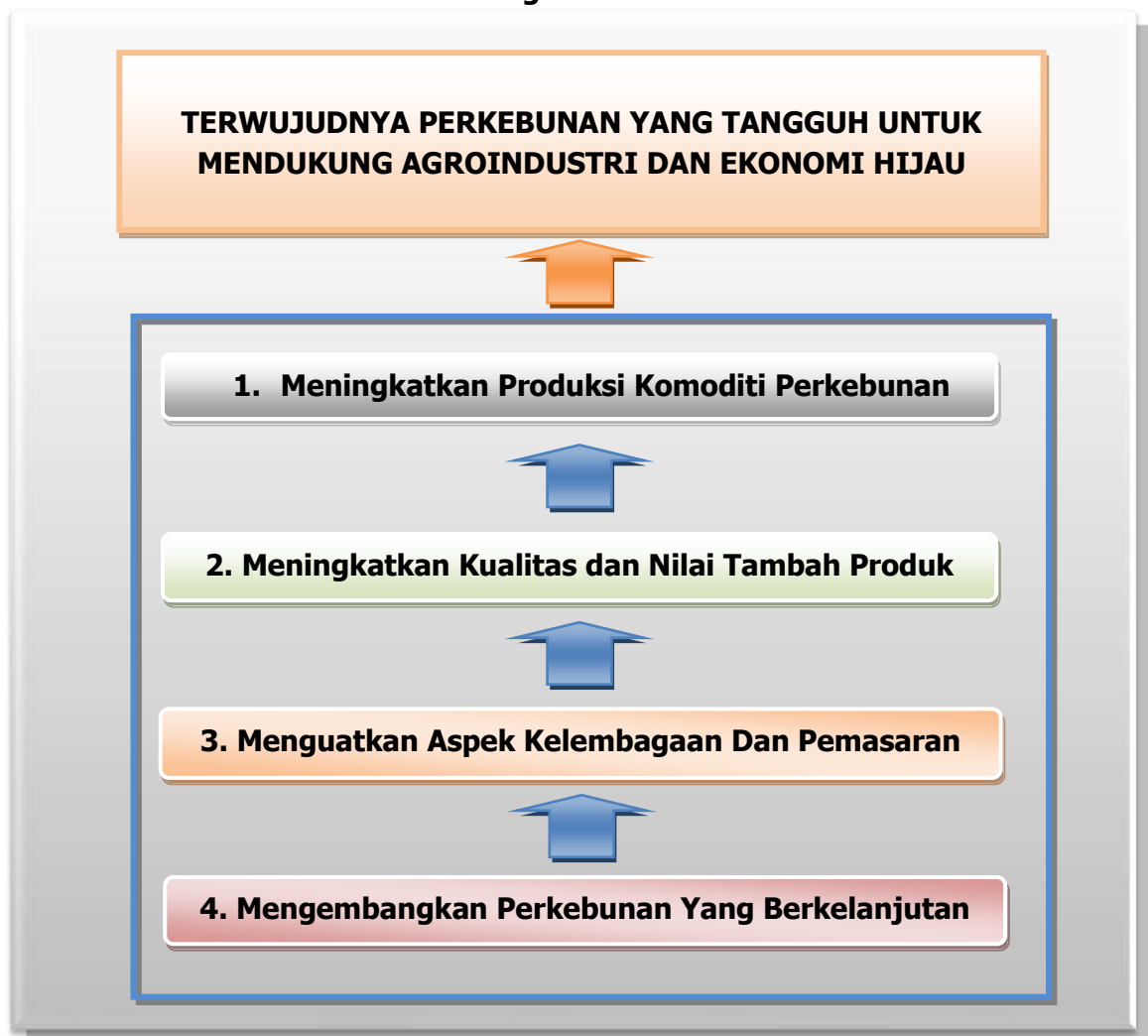
Sederhananya, pertanian berkelanjutan mencakup tiga aspek kehidupan, yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Dengan pengertian tersebut, maka praktek perkebunan yang menekankan keuntungan (jangka pendek) dengan mengorbankan kualitas lingkungan akan memiliki dampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup. Dilain pihak, praktek perkebunan yang menekankan kualitas lingkungan dengan mengabaikan keuntungan jangka pendek juga tidak sesuai dengan misi perkebunan berkelanjutan. Demikian pula usaha pertanian yang sangat produktif tetapi menggunakan sumber daya tidak terbarukan dalam jumlah yang banyak (misal bahan bakar fosil atau sumber daya air tidak terbarukan) juga tidak akan dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Dengan persyaratan bahwa pertanian berkelanjutan harus menguntungkan secara ekonomis, mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup, maka pilihan teknologi berbasis sumber daya hayati merupakan teknologi yang paling tepat untuk mewujudkan perkebunan berkelanjutan.

Pembangunan perkebunan jika dilaksanakan dengan menerapkan GAP (*Good Agriculture Practices*) dan GMP (*Good Manufacturing Practices*) serta prinsip-prinsip pembangunan perkebunan berkelanjutan akan mewujudkan perkebunan berkelanjutan berasaskan pertumbuhan ekonomi hijau. Provinsi Kalimantan Timur masa mendatang akan berupaya untuk merevitalisasi bidang perkebunan dalam rangka mendukung terciptanya pembangunan ekonomi yang selaras dengan pelestarian lingkungan. Hal ini dilaksanakan sebagai bagian dari usaha pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (*green development*) dengan program dan kegiatan yang meliputi pengembangan perkebunan berupa pemanfaatan lahan terdegradasi/kritis, optimalisasi penggunaan lahan, serta penerapan ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*).

Dari keempat misi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.1
Hubungan Visi dan Misi



Dari gambar di atas tampak jelas bahwa untuk menjamin terwujudnya visi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, dibutuhkan empat misi yang saling selaras dan melengkapi. Pada gambar di atas, secara implisit menunjukkan bahwa peningkatan produksi merupakan misi utama agar agroindustri dapat diwujudkan. Untuk itu, dibutuhkan dukungan dua misi berikutnya yaitu peningkatan kualitas dan nilai tambah produk dserta penguatan aspek kelembagaan dan pemasaran subsektor perkebunan. Namun sebagai pondasi awal dalam pelaksanaan misi-misi tersebut perlu diperhatikan asas perkebunan berkelanjutan sebagai patokan utama di setiap tahapan pelaksanaan program/kegiatan. Jika misi-misi dilaksanakan sesuai dengan perencanaan strategis Dinas Perkebunan maka bukan hal yang mustahil agroindustri dan ekonomi hijau d Provinsi Kalimantan Timur akan terwujud.

4.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Visi dan misi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur merupakan “titik tolak” perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah sebagai potret kondisi subsektor perkebunan yang diinginkan oleh setiap elemen pemerintah dalam kerangka pencapaian pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dan potensi baik dalam cakupan pelaku langsung maupun sebagai pendukung pembangunan subsektor perkebunan. Dalam upaya tersebut, seluruh sumber daya dan potensi subsektor perkebunan harus mempunyai *core-competencies* untuk mencapai tujuan dan sasaran kelembagaan melalui rencana strategis Dinas Perkebunan.

Sebagai salah satu komponen penting dalam perencanaan strategis, **tujuan** dapat dirumuskan sebagai gambaran tentang keadaan yang diinginkan atau dicitakan oleh Dinas Perkebunan selama kurun waktu lima tahun ke depan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, tujuan Dinas Perkebunan merupakan sebuah upaya dalam mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018. Tujuan jangka menengah ini ditetapkan untuk memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih pada masing-masing misi dengan mengacu kepada pernyataan visi sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada masa mendatang.

Adapun tujuan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Misi Pertama adalah **Meningkatkan Produksi Komoditi Perkebunan**, yang mempunyai tujuan sebagai berikut:
 - Meningkatkan produksi perkebunan,
2. Misi Kedua adalah **Meningkatkan Kualitas dan Nilai Tambah Produk**, yang mempunyai tujuan sebagai berikut:
 - Meningkatkan produk berstandar nasional dan internasional, dan
 - Meningkatkan produk primer perkebunan menjadi bahan setengah jadi dan barang jadi.
3. Misi Ketiga adalah **Menguatkan Aspek Kelembagaan dan Pemasaran**, yang mempunyai tujuan sebagai berikut:
 - Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan petani serta pemasaran, dan
 - Meningkatkan peran pembinaan aparatur.
4. Misi Keempat adalah **Mengembangkan Perkebunan yang Berkelanjutan**, yang mempunyai tujuan sebagai berikut:
 - Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip perkebunan yang ramah lingkungan.

Sasaran merupakan sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perkebunan dalam periode lima tahun ke depan sesuai dengan penjabaran dari tujuan rencana strategis. Dari keenam tujuan Renstra Dinas Perkebunan, dapat dirumuskan turunan tujuan berupa sasaran-sasaran perencanaan pembangunan subsektor perkebunan yang efektif dan efisien serta memiliki indikator yang spesifik, jelas, dan terukur sebagai bahan evaluasi, monitoring, dan perencanaan pembangunan di masa yang akan datang. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur periode 2013-2018 sebagai pendukung pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Tujuan pertama, "Meningkatkan produksi perkebunan" dapat dicapai dengan sasaran:
 - Meningkatnya produksi kelapa sawit, karet, kakao, kelapa dalam, dan lada, dengan indikator sebagai berikut:

- ✓ Jumlah produksi (ton per tahun) setiap komoditas,
 - ✓ Tingkat produktivitas (ton/hektar per tahun) setiap komoditas, dan
 - ✓ Penambahan luas kebun (hektar) setiap komoditas.
2. Tujuan kedua, "Meningkatkan produk berstandar nasional dan internasional" dapat dicapai dengan sasaran:
- Meningkatnya produk berstandar nasional dan internasional, dengan indikator sebagai berikut:
 - ✓ Persentase produk yang bersertifikasi (%).
3. Tujuan ketiga, "Meningkatkan produk primer perkebunan menjadi bahan setengah jadi dan barang jadi" dapat dicapai dengan sasaran:
- Meningkatnya nilai tambah produk perkebunan, dengan indikator sebagai berikut:
 - ✓ Persentase penerapan teknologi ramah lingkungan (%).
4. Tujuan keempat, "Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan petani" dapat dicapai dengan sasaran:
- Meningkatnya Kesejahteraan petani pekebun, dengan indikator sebagai berikut
 - ✓ Jumlah dan kemandirian kelompok tani/gapoktan
5. Tujuan kelima, "Meningkatkan peran dan pembinaan aparatur" dapat dicapai dengan sasaran:
- Meningkatnya ketersediaan tenaga fungsional dan teknis perkebunan, dengan indikator sebagai berikut:
 - ✓ Jumlah tenaga teknis fungsional/tahun
6. Tujuan keenam, "Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip perkebunan yang ramah lingkungan" dapat dicapai dengan sasaran:
- Menurunnya gas emisi rumah kaca subsektor perkebunan, dengan indikator sebagai berikut:
 - ✓ Jumlah kegiatan yang dapat menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pertahun
 - Meningkatnya jumlah perusahaan perkebunan yang menerapkan prinsip-prinsip perkebunan yang berkelanjutan, diantaranya menerapkan ISPO/RSPO, dengan indikator sebagai berikut :

- ✓ Jumlah dan luas areal perusahaan perkebunan yang menerapkan ISPO/RSPO

Selanjutnya, indikator dan target dari masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2013-2018

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi awal (2013*)	Target kinerja sasaran pada tahun ke -					Target akhir (2018)
					1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan produksi perkebunan	Meningkatnya produksi kelapa sawit	Jumlah produksi kelapa sawit (ton per tahun)	6.975.000	9.600.000	11.200.000	12.400.000	14.600.000	18.000.000	18.000.000
		Meningkatnya produksi karet	Jumlah produksi karet (ton per tahun)	52.709	55.216	57.752	60.318	62.910	65.537	65.537
		Meningkatnya produksi kakao	Jumlah produksi kakao (ton per tahun)	7.612	8,085	8.550	9.028	9.520	10.415	10.415
		Meningkatnya produksi kelapa dalam	Jumlah produksi kelapa dalam (ton per tahun)	5.835	6.430	7.496	8.301	9.137	9.680	9.680
		Meningkatnya produksi lada	Jumlah produksi lada (ton per tahun)	5.785	6.331	6.890	7.464	8.052	8.654	8.654
		Meningkatnya produktivitas kelapa sawit	Tingkat produktivitas kelapa sawit (ton/ha per tahun)	15,50	16,00	16,50	17,00	17,50	18,00	18,00
		Meningkatnya produktivitas karet	Tingkat produktivitas karet (ton/ha per tahun)	1,24	1,25	1,26	1,27	1,28	1,29	1,29
		Meningkatnya produktivitas kakao	Tingkat produktivitas kakao (ton/ha per tahun)	0,67	0,69	0,71	0,73	0,75	0,80	0,80
		Meningkatnya produktivitas kelapa dalam	Tingkat produktivitas kelapa dalam (ton/ha per tahun)	0,41	0,44	0,50	0,54	0,58	0,60	0,60
		Meningkatnya produktivitas lada	Tingkat produktivitas lada (ton/ha per tahun)	1,27	1,29	1,31	1,33	1,35	1,37	1,37
		Terbangunnya kebun kelapa sawit	Penambahan luas kebun kelapa sawit (hektar)	1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000
		Terbangunnya kebun karet	Penambahan luas kebun karet (hektar)	100.000	102.000	104.000	106.000	108.000	110.000	110.000
		Terbangunnya kebun kakao	Penambahan luas kebun kakao (hektar)	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000	12.500	12.500

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2013-2018**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi awal (2013*)	Target kinerja sasaran pada tahun ke -					Target akhir (2018)
					1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Terbangunnya kebun kelapa dalam	Penambahan luas kebun kelapa dalam (hektar)	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000	22.500	22.500
		Terbangunnya kebun lada	Penambahan luas kebun lada (hektar)	9.000	9.500	10.000	10.500	11.000	11.500	11.500
2	Meningkatkan produk berstandar nasional dan internasional	Meningkatnya produk berstandar nasional dan internasional	Persentase produk yang bersertifikasi (%)	0	5	5	5	5	5	25
3	Meningkatkan produk primer perkebunan menjadi bahan setengah jadi dan barang jadi	Meningkatnya nilai tambah produk perkebunan	Persentase penerapan teknologi (%)	45	5	5	5	5	5	25
4	Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan petani	Meningkatnya kesejahteraan petani pekebun	Jumlah dan kemandirian kelompok tani/gapoktan	50	5	5	5	5	5	25
5	Meningkatkan peran dan pembinaan aparatur	Meningkatnya ketersediaan tenaga fungsional dan teknis perkebunan	Jumlah tenaga teknis fungsional/tahun	7	6	4	4	4	4	22
6	Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip perkebunan yang ramah lingkungan	Meningkatnya jumlah kegiatan yang menerapkan penurunan emisi GRK	Jumlah kegiatan yang dapat menurunkan emisi GRK/tahun	2	5	5	5	5	5	25

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Sebagai dinas teknis yang memiliki tugas pokok dan fungsi pada sektor pertanian, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur menjabarkan tujuan dan sasaran dengan cukup terarah pada kerangka pembangunan provinsi namun tetap mengerucut pada pola subsektor perkebunan. Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perkebunan diperlukan strategi dan kebijakan yang secara teknis disesuaikan pada arah pembangunan daerah sehingga tetap berjalan sesuai koridor perencanaan pembangunan secara menyeluruh. Penyusunan strategi dan kebijakan pada Renstra Dinas Perkebunan akan melibatkan keseluruhan elemen kelembagaan Dinas Perkebunan maupun pelaku langsung subsektor perkebunan (masyarakat dan swasta). Oleh karena itu, dalam pelaksanaan program/kegiatan perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi sehingga mempermudah pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di subsektor perkebunan dan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya.

Strategi adalah rangkaian cara atau langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif dalam rangka meningkatkan persentase keberhasilan pencapaian pembangunan daerah baik secara umum maupun sektoral. Strategi merupakan kesatuan rencana yang umum, luas, dan terintegrasi yang menghubungkan antara sumber daya, potensi, program kerja, dan permasalahan yang menghadang dalam rangka mewujudkan cita-cita pemerintah daerah untuk menyejahterakan masyarakatnya. Strategis harus bersifat *incremental* (terus meningkat) serta taktis terhadap ruang lingkup yang terbatas dan periode waktu dalam pencapaian tujuan. Sedangkan rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dengan tindak lanjut berupa penyusunan serangkaian kebijakan yang tepat.

Dalam pencapaian visi dan misinya, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur harus memiliki strategi-strategi yang dihasilkan dari analisis maupun kajian baik pada evaluasi pembangunan subsektor perkebunan periode sebelumnya, isu-isu dan permasalahan yang sedang maupun akan dihadapi, hingga dampak positif maupun negatif dari program/kegiatan pendukung pembangunan daerah dan subsektor perkebunan. Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Perkebunan dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths-Opportunity*) yang mengarah pada

kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan dalam mencapai cita-cita pembangunan daerah.

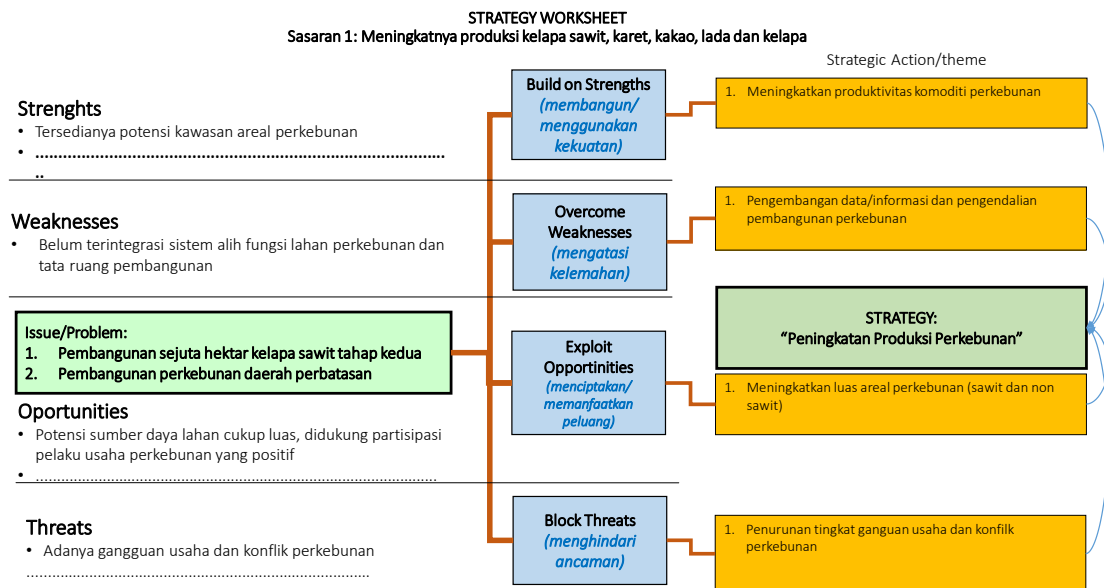
Kebijakan merupakan suatu bentuk, hasil, produk, atau fungsi dari suatu kesepakatan melalui analisis panjang terkait rumusan, rincian, penjelasan, maupun penilaian atas suatu permasalahan pembangunan daerah yang dikelola sedemikian rupa sehingga menghasilkan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan program/kegiatan. Kebijakan yang akan diambil memberikan arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program/kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Kebijakan dapat bersifat internal yang berarti kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yang memiliki fokus kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan subsektor perkebunan, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur menyusun strategi dalam mengaplikasikan setiap program/kegiatan pembangunan daerah khususnya subsektor perkebunan. Berikut strategi dan kebijakan Dinas Perkebunan dalam Renstra tahun 2013-2018:

1. Strategi 1: Peningkatan produksi perkebunan

Provinsi Kalimantan Timur memiliki beberapa komoditas perkebunan yang efektif sebagai lokomotif perkembangan perekonomian sekaligus “jalan” dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama petani. Komoditas utama perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur antara lain kelapa sawit, kakao, karet, kelapa dalam, dan lada. Meskipun begitu, kajian-kajian untuk penambahan komoditas unggulan terus dilaksanakan karena peningkatan hasil produksi pertanian (perkebunan pada khususnya) akan diperhitungkan dalam peningkatan ekonomi berkelanjutan. Selain karena merupakan sumber daya alam yang terbaharukan, hasil produksi perkebunan dapat dijual secara “mentah” maupun dijual dengan nilai tambah (pengolahan menjadi barang setengah jadi atau barang jadi).

Strategi dimaksud merupakan hasil analisis SWOT sebagai berikut:



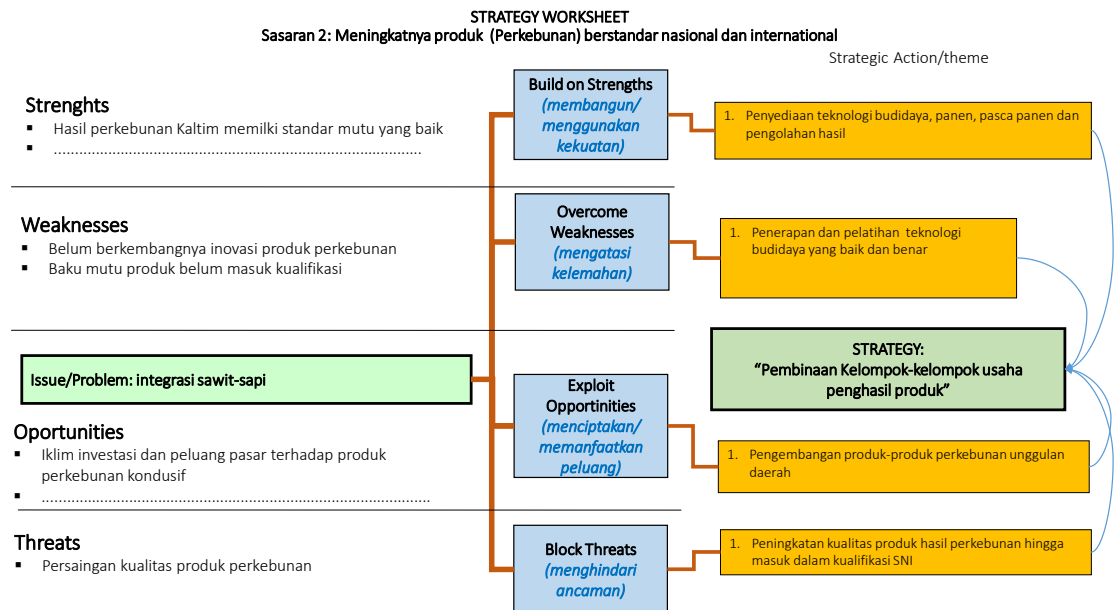
Dalam merealisasikan strategi tersebut, Renstra Dinas Perkebunan mempunyai kebijakan sebagai berikut:

- ✓ Meningkatkan produktivitas komoditi perkebunan;
- ✓ Meningkatkan luas areal perkebunan;
- ✓ Pengembangan data/informasi dan pengendalian pembangunan perkebunan; dan
- ✓ Penurunan tingkat gangguan usaha dan konflik perkebunan.

2. Strategi 2: Pembinaan kelompok-kelompok usaha penghasil produk

Hasil perkebunan yang melimpah dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha kecil menengah untuk memberikan nilai tambah pada produk mentah sehingga memiliki nilai tambah/nilai jual tinggi ketika "dilempar" ke pasar. Dinas perkebunan mempunyai strategi untuk membina kelompok-kelompok usaha berskala kecil dan menengah untuk mengolah hasil perkebunan menjadi barang yang lebih bermanfaat dan berdaya saing melalui penyediaan sarana dan prasarana maupun pendampingan dalam pengembangan industri berbasis rumah tangga. Pembinaan kelompok-kelompok usaha akan menjadi penggerak industri pengolahan mikro/kecil sekaligus menjadi upaya menciptakan produk unggulan dari hasil perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

Strategi dimaksud merupakan hasil analisis SWOT sebagai berikut:



Dalam merealisasikan strategi tersebut, Renstra Dinas Perkebunan mempunyai kebijakan sebagai berikut:

- ✓ Penyediaan teknologi budidaya, panen, pasca panen, dan pengolahan hasil;
- ✓ Penerapan dan pelatihan teknologi budidaya yang baik dan benar;
- ✓ Peningkatan kualitas produk hasil perkebunan hingga masuk kualifikasi SNI; dan
- ✓ Pengembangan produk-produk perkebunan unggulan daerah.

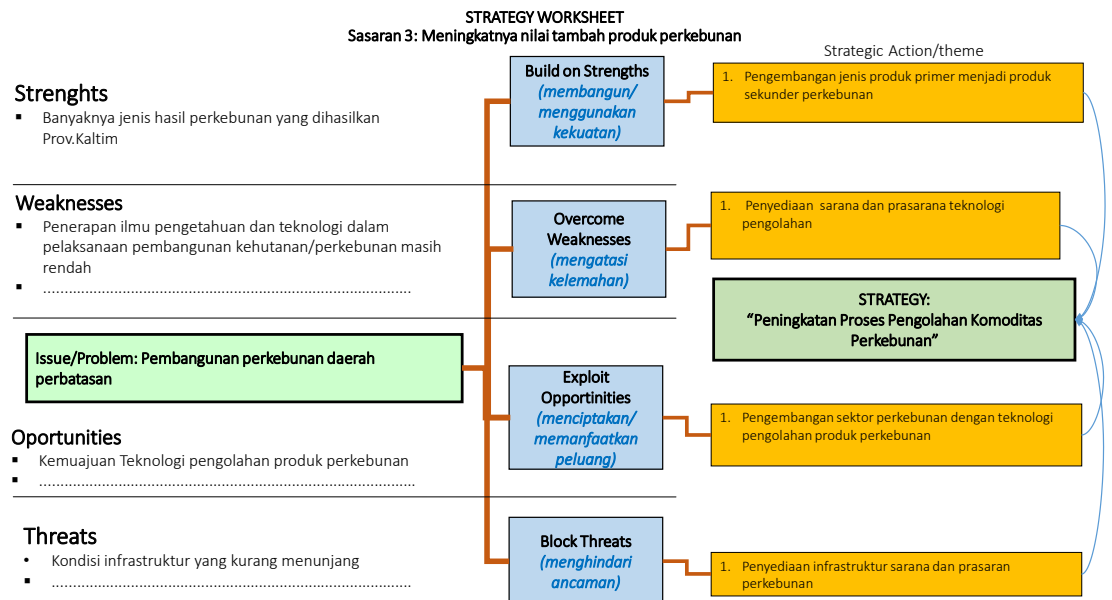
3. Strategi 3: Peningkatan proses pengolahan komoditas perkebunan

Sebagian besar hasil perkebunan dijual secara mentah karena banyak dari masyarakat pertanian yang belum mengetahui cara pengolahan hasil perkebunan. Seperti komoditas kakao, oleh pekebun, kakao diambil bijinya untuk dikeringkan kemudian langsung dijual ke penadah, padahal biji kakao bisa diolah sendiri oleh petani untuk meningkatkan nilai jual hasil olahan biji kakao.

Penting adanya peran Dinas Perkebunan untuk memberikan sosialisasi dan menyediakan sarana pengembangan teknologi pengolahan komoditas merupakan strategi yang tepat sasaran dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dengan adanya peningkatan nilai tambah di setiap komoditas perke-

bunan, diharapkan kesejahteraan pekebun dapat meningkat seiring bertambahnya pendapatan dari subsektor perkebunan.

Strategi dimaksud merupakan hasil analisis SWOT sebagai berikut:



Dalam merealisasikan strategi tersebut, Renstra Dinas Perkebunan mempunyai kebijakan sebagai berikut:

- ✓ Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana teknologi pengolahan perkebunan;
- ✓ Pengembangan sector perkebunan dengan teknologi pengolahan produk perkebunan; dan
- ✓ Pengembangan jenis hasil produk perkebunan primer menjadi produk sekunder.

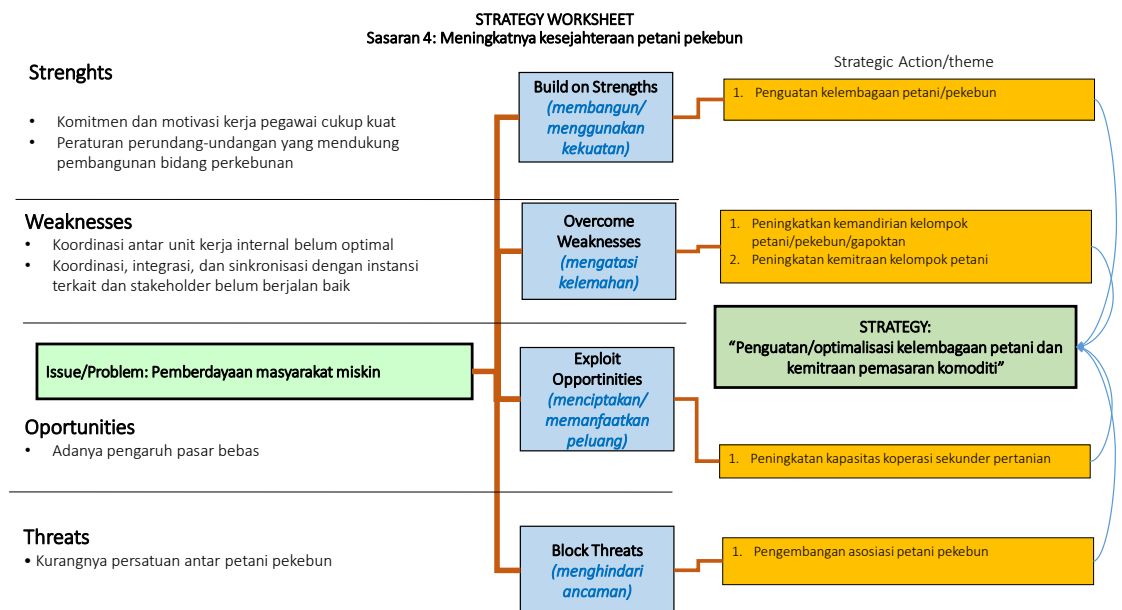
4. Strategi 4: Penguatan/optimalisasi kelembagaan petani dan kemitraan pemasaran komoditi

Minimnya pengetahuan petani perkebunan terhadap segala macam informasi terkait perkembangan teknologi, keterampilan berkebun, hingga pemasaran hasil panen membuat kerugian tersendiri bagi pekebun dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Seperti pada kasus penjualan hasil panen produk mentah

perkebunan kepada penadah tanpa mengetahui harga komoditas perkebunan di pasaran. Hal tersebut menyebabkan pekebun dapat dirugikan karena harga yang ditawarkan penadah jauh di bawah harga pasar. Oleh sebab itu penting adanya suatu organisasi atau kelembagaan yang menaungi petani secara umum dan pekebun secara khusus dalam mengelola hasil pertanian dari hulu ke hilir.

Organisasi atau lembaga tersebut akan memberi pengetahuan atau informasi terkait hal-hal penting dalam pengelolaan perkebunan sehingga pekebun tidak rugi dalam melaksanakan kegiatan pertaniannya. Dengan adanya penguatan/optimalisasi kelembagaan perkebunan, maka petani perkebunan dapat menjalin kemitraan sesuai dengan kewajaran baik perorangan maupun perusahaan.

Strategi dimaksud merupakan hasil analisis SWOT sebagai berikut:



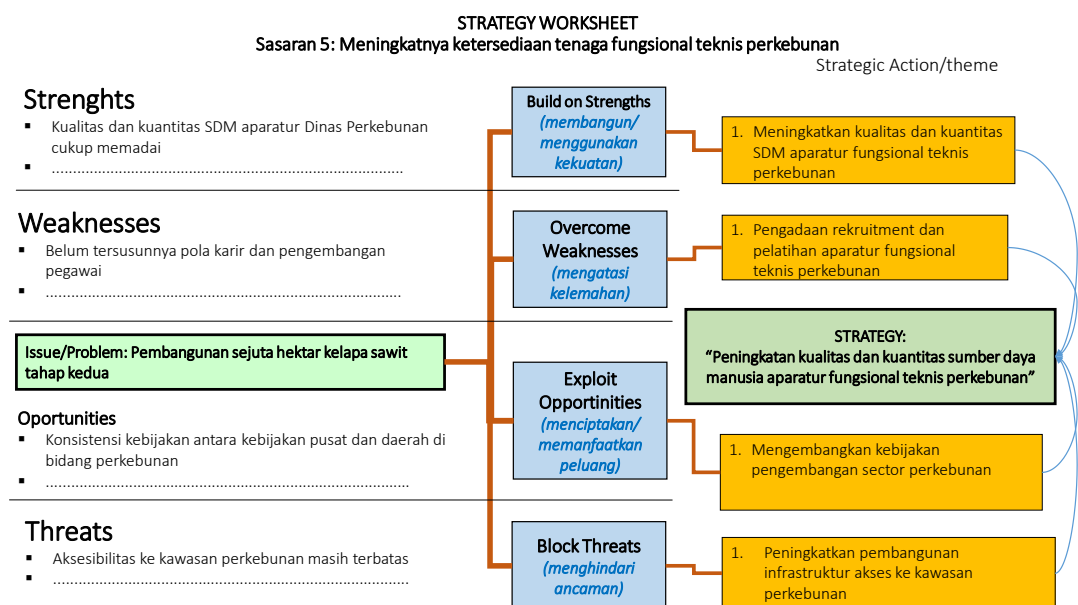
Dalam merealisasikan strategi tersebut, Renstra Dinas Perkebunan mempunyai kebijakan sebagai berikut:

- ✓ Penguatan dan pengembangan kelembagaan dan asosiasi petani/pekebun;
- ✓ Peningkatan kemandirian kelompok petani/pekebun/gapoktan;
- ✓ Peningkatan kemitraan kelompok tani; dan
- ✓ Peningkatan kapasitas koperasi sekunder pertanian.

5. Strategi 5: Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur fungsional teknis perkebunan

Wilayah perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur tidak terdapat di satu daerah saja, tetapi tersebar di berbagai penjuru wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Fungsi pengawasan dan pengarahan kepada petani perkebunan harus dilakukan secara merata dan kontinyu agar peningkatan kualitas perkebunan tetap terjaga. Untuk melaksanakan tugas dalam fungsi pengawasan dan pengarahan, Dinas perkebunan memerlukan sumber daya manusia yang menguasai teknis fungsional perkebunan secara kualitas maupun kuantitas sehingga pemerataan aparatur fungsional di setiap titik perkebunan dapat terjangkau.

Strategi dimaksud merupakan hasil analisis SWOT sebagai berikut:



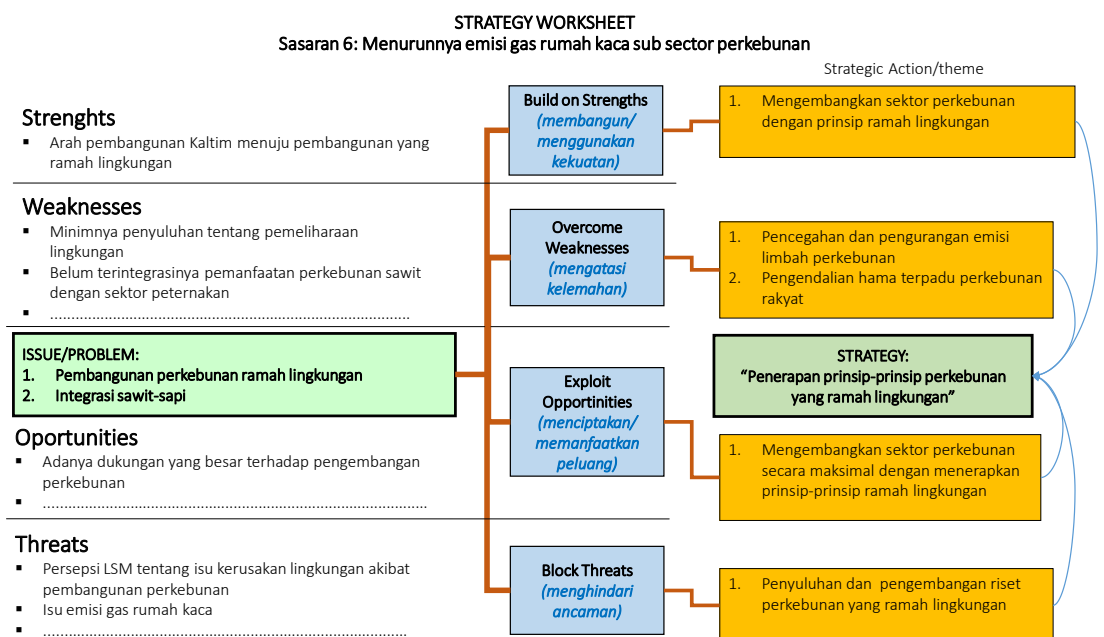
Dalam merealisasikan strategi tersebut, Renstra Dinas Perkebunan mempunyai kebijakan sebagai berikut:

- ✓ Pengadaan rekrutmen dan pelatihan aparatur fungsional teknis perkebunan; dan
- ✓ Peningkatan pembangunan infrastruktur akses ke kawasan perkebunan.

6. Strategi 6: Penerapan prinsip-prinsip perkebunan yang ramah lingkungan

Dalam rangka mengantisipasi isu strategis terkait lingkungan hidup, penerapan prinsip-prinsip perkebunan yang berkelanjutan menjadi poin penting dalam pelaksanaan pembangunan subsektor perkebunan. Pengelolaan perkebunan dari awal penanaman hingga pasca panen harus memenuhi syarat mutlak berupa ramah lingkungan. Oleh karena itu, dalam mengaplikasikan strategi tersebut, Dinas Perkebunan akan membuat langkah-langkah langsung seperti penggunaan pupuk alami dan mengurangi penggunaan pupuk buatan pabrik/kimia (yang mengakibatkan residu tanah dan mengurangi kualitas unsur hara pada tanah). Selain itu, Dinas Perkebunan akan memonitoring industri pengolahan hasil perkebunan dimana pengolahan harus sesuai dengan prinsip-prinsip agroindustri yang ramah lingkungan.

Strategi dimaksud merupakan hasil analisis SWOT sebagai berikut:



Dalam merealisasikan strategi tersebut, Renstra Dinas Perkebunan mempunyai kebijakan sebagai berikut:

- ✓ Pencegahan dan pengurangan emisi limbah perkebunan;
- ✓ Pengendalian hama terpadu perkebunan rakyat; dan

- ✓ Penyuluhan dan pengembangan riset tentang pembangunan perkebunan yang ramah lingkungan.

Tabel 4.2.
Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, & Kebijakan
Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Visi: Terwujudnya Perkebunan Yang Tangguh Untuk Mendukung Agroindustri dan Ekonomi Hijau				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi 1: Meningkatkan produksi komoditi perkebunan				
1.	Meningkatkan Produksi Perkebunan	Meningkatnya produksi, produktivitas, dan terbangunnya kebun kelapa sawit, karet, kakao, kelapa, & lada	Peningkatan produksi perkebunan	Meningkatkan produktivitas komoditi perkebunan Meningkatkan luas areal perkebunan Penurunan tingkat gangguan usaha dan konflik perkebunan
Misi 2: Meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk				
2.	Meningkatkan produk berstandar nasional dan internasional	Meningkatnya produk berstandar nasional dan internasional	Pembinaan kelompok-kelompok usaha penghasil produk	Penyediaan teknologi budidaya, panen, pasca panen, dan pengolahan hasil Penerapan teknologi budidaya yang baik dan benar
3.	Meningkatkan produk primer perkebunan menjadi bahan setengah jadi dan barang jadi	Meningkatnya nilai tambah produk perkebunan	Peningkatan proses pengolahan komoditas perkebunan	Penyediaan sarana dan prasarana teknologi pengolahan
Misi 3: Memperkuat Aspek Kelembagaan dan Pemasaran				
4.	Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan petani	Meningkatnya kesejahteraan petani pekebun	Penguatan/optimalisasi kelembagaan petani dan kemitraan pemasaran komoditi	Peningkatan kemandirian kelompok tani/gapoktan Pengembangan asosiasi petani pekebun Peningkatan kemitraan kelompok tani Peningkatan kapasitas koperasi sekunder pertanian
5.	Meningkatkan peran dan pembinaan aparatur	Meningkatnya ketersediaan tenaga fungsional dan teknis perkebunan	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM aparatur fungsional teknis perkebunan	Rekrutmen dan pelatihan serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung kelembagaan
Misi 4: Mengembangkan Perkebunan yang Berkelanjutan				
6.	Mewujudkan penerapan prinsip-prinsip perkebunan yang ramah lingkungan	Menurunnya emisi gas rumah kaca subsektor perkebunan	Penerapan prinsip-prinsip perkebunan yang ramah lingkungan	Pencegahan dan pengurangan emisi limbah perkebunan